

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2014). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, A. (2006). Kejahatan Terhadap Harta Benda. Jakarta: Bayu Media.
- Efendi, J. (2020). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.
- Gunadi, I. (2011). Cepat dan Mudan Memahami HUKUM PIDANA (jilid 1). Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya.
- _____. (2014). Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A. (2001). Bunga Rampa Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia Jakarta.
- Irwansyah. (2022). Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Junaedi, M. (2017). Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam. Depok: Kencana.
- Kuffal, H. (2011). Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum. Malang: UMM Press.
- Prakoso, D. (1998). Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, W. (2008). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zainuddin Ali, M. (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

- Purwoleksono, D. E. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahardjo, S. (1998). *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Rosyadi, I. (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Sidarta. (2006). *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Utomo.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Caroline, A., Badu, L. W., & Achir, N. (2024). Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kepemilikan Hak Atas Tanah:(Studi di Desa Pilohayanga). *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 44-53. +DOI: <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.245>
- Jafar, W. A. (2016). Analisis Asas Hukum Pidana Islam Dan Asas Hukum Pidana Di Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(1 June), 25-44. +DOI: <https://doi.org/10.29240/jhi.v1i1.55>
- Kuswindarti. (2009). Pola Pembelaan dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan . *Jurnal Manajerial*.

- Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. (2021). Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768-789. +DOI: <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270. +DOI: <https://doi.org/10.51278/bce.v3i2.900>
- Massie, M. (2017). Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan Pasal 415 KUHP. *Lex Crimen*, 6(7).
- Ngape, H. B. A. (2018). Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1). +DOI: <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1229>
- Nur, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor: 945/Pid. B/2016/PN. Mks). *AL-AHKAM*, 1(1).
- Ponglabba, C. S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Crimen*, 6(6).
- Setiawan, A. (2017). Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 204-215. +DOI: <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.257>
- Simanjuntak, F., Hutabarat, D. E., Estella, W., & Purba, D. N. (2020). Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif

Indonesia. *Doktrina: Journal of Law*, 3(2), 119-127. +DOI: <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i2.3950>

Subakti, I. W. A., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Asing Korban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Sewa Menyewa Tanah. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 173-177. +DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2003.173-177>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Nomor 4401)

D. Internet

Komite Profesi Akuntan Publik (2022). Istilah Pertimbangan dalam Khasanah Hukum NKRI. <https://kpap.go.id/wp-content/uploads/2022/04/Istilah->

Pertimbangan-dalam-Khasanah-Hukum-RI/ (Diakses pada tanggal 20 Agustus 2025 Pukul 18.15 WIB).

Kejaksaan Negeri Mamasa. <https://kejarimamasa.kejaksaan.go.id/index.php/pertimbangan-hukum/> . Diakses pada tanggal 2 November 2024 Pukul 12. 00 WIB.

E. Lain-Lain

Wawancara Bapak Putu Wahyudi S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jombang, 29 Juli 2025, 10.00 WIB.

Wawancara Bapak Septian Hery Saputra, S.H., Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan, Kejaksaan Negeri Jombang, 21 April 2025, 09.00 WIB.

Wawancara Ibu Anjas Mega Lestari, S.H., Kepala Sub Seksi Perdata TUN, Kejaksaan Negeri Jombang, 21 April 2025, 14.00 WIB.